ISSN: 2337-3067

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7 (2016): 2123-2160

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KESEMPATAN KERJA, PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Sri Danawati¹ I K.G. Bendesa² Made Suyana Utama³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email: sri_danawati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali, untuk menganalisis pengaruh investasi dan kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, untuk menganalisis pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan tehadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of government expenditure and investment on employment districts / cities in the province of Bali, to analyze the effect of investment and employment to economic growth districts / cities in the province of Bali, to analyze the effect of government expenditure, investment, employment and economic growth to income inequality district / city in the province of Bali, to analyze the indirect effect of government expenditure and investment on income inequality through employment and economic growth district / city in the province of Bali. The result of the study shown that government expenditure and investment positive and significant effect on employment. Investment positive and significant effect on economic growth. Employment positive effect but not significant on economic growth. Investment positive effect but not significant on income inequality district / city in the province of Bali. Government expenditure, employment, and economic growth significant positive effect on income inequality district / city in the province of Bali. Government expenditure and investment indirectly positive effect on income inequality through employment and economic growth district / city in the province of Bali.

Keywords: government expenditure, investment, employment, economic growth, income inequality.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan pendapatan menjadi tujuan setiap daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi ini terlihat dari meningkatnya konsumsi akibat meningkatnya pendapatan. Simon Kuznets (1955) mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Arsyad (1999) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Keberhasilan pembangunan ekonomi itu sering ditafsirkan sebagai pertambahan pendapatan nasional atau produk bagi suatu bangsa, tanpa mempersoalkan siapa yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Tingginya tingkat penghasilan perkapita yang dicapai tidak menjamin pemerataan hasil pembangunan, justru dengan hasil laju pertumbuhan yang tinggi itu diikuti pula ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, disamping terjadinya urbanisasi yang tidak dapat dibendung, sebagai akibat dari menumpuknya industrialisasi di daerah perkotaan (Ardani, 1996 dalam Suyana Utama, 2009).

Dalam melaksanakan suatu pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, suatu daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup. Hal ini untuk menghindari ketergantungan daerah pada pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya. Menurut Suhartanto dan Kusdibyo (2005), kesiapan pemerintah daerah dan instansi-instansinya tidak terbatas pada kesiapan pengelolaan sumber alam, namun juga berupa kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang ada di wilayahnya sehingga mampu menarik

investasi ke daerahnya. Keberhasilan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan kebijakan yang mendorong kegiatan bisnis di wilayahnya, akan membawa banyak keuntungan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di daerah tersebut. Bagi pemerintah daerah, kegiatan tersebut merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak. Sedangkan bagi masyarakat umum, keberhasilan menarik investasi tersebut akan menyerap lapangan kerja dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002). Kapasitas keuangan daerah ditunjukkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut UU No.32 dan 33 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan. Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memuat rincian semua penerimaan daerah di satu sisi dan semua pengeluaran daerah di sisi yang lain. Sebelum tahun 2003 APBD dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan, (Suyana Utama 2009).

Distribusi alokasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali terjadi ketimpangan. Perbedaan ini disebabkan alokasi belanja pemerintah yang dikeluarkan melalui belanja publik kurang menyentuh masyarakat. Idealnya,

distribusi dana ke dalam pos-pos anggaran harus dapat memenuhi kebutuhan publik terhadap sarana dan prasarana umum. Pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali sangat berfluktuasi untuk setiap tahunnya dan cenderung meningkat namun Pendapatan Asli Daerah yang berbeda menjadi sebab kurang optimalnya pengeluaran belanja publik untuk program-program pemerintah melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi di daerah. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Sjafii, 2009). Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Dampak setelah krisis ekonomi di Indonesia bahwa ekonomi domestik masih menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mempertahankan perekonomian khususnya di Bali, ditunjukkan dengan perkembangan realisasi PMDN yang semakin meningkat. Perkembangan selanjutnya investasi regional diharapkan akan lebih banyak dipenuhi dari sektor swasta, dengan sektor pemerintah bertindak sebagai penyedia infrastruktur (sarana dan prasarana) bagi tumbuhnya investasi swasta tersebut. Kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan kabupaten/kota tetap akan terjadi dan cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk masyarakat terutama berpenghasilan rendah ikut ambil bagian dalam proses pembangunan. Dengan demikian analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan penting dilakukan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2) Untuk menganalisis pengaruh investasi dan kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, 3) Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, 4) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali menggunakan metode analisis jalur dengan program AMOS.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitif, yaitu data yang berbentuk satuan hitung, menyangkut pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Cakupan data adalah kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan rentang waktu dari tahun 2005-2013.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder (Bungin, 2001), terdiri atas gambaran umum Provinsi Bali, data pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Penelitian juga didukung dengan data dari pustaka-pustaka dan penelitian sebelumnya.

Metode Pengumpulan Data

Seluruh data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi nonpartisipan. Metode observasi nonpartisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung dokumen yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pengeluaran pemerintah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali, baik oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD, untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran pemerintah yang dianalisis adalah pengeluaran pemerintah perkapita yang dinyatakan dalam ribuan rupiah.
- 2) Investasi merupakan pembentukan modal tetap bruto oleh sektor swasta yang digunakan untuk pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri. Investasi dianalisis yaitu investasi perkapita yang dinyatakan dalam ribuan rupiah
- 3) Kesempatan kerja (*employment*) adalah kesempatan yang tercipta akibat perkembangan ekonomi tertentu, dalam arti kesempatan kerja itu mungkin saja sudah terisi atau ada yang belum terisi. Kesempatan kerja yang selama ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baik melalui sensus penduduk maupun survai penduduk baik kesempatan kerja yang dirinci menurut lapangan usaha, jenis jabatan, maupun status hubungan kerja adalah

menyangkut kesempatan kerja yang telah terisi. Kesempatan kerja dalam penelitian ini merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja yang ddiukur dari rasio jumlah orang yang bekeja dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam satuan persen.

- 4) Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah yang dapat diukur dari perkembangan PDRB suatu tahun dengan tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
- 5) Ketimpangan pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio (GR).

Teknik Analisis Data

Menurut Kuznets (dalam Sukirno, 1985) bahwa proses pembangunan ekonomi suatu negara pada tahap awal umumnya disertai oleh kemorosotan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, dan baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih baik pada tahap pembangunan lebih lanjut. Setiap pembangunan ekonomi menimbulkan perubahan distribusi pendapatan masyarakat. Perhitungan koefisien jalur dalam penelitian ini menggunakan program *Analysis Moment of Structural (AMOS*).

Model Teoritis

Hubungan kausalitas yang berjenjang atau hubungan sebab akibat antarvariabel dalam studi ini merupakan model yang tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda, sebagai variabel independen pada suatu

ISSN: 2337-3067

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7 (2016): 2123-2160

hubungan, namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel yaitu pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Variabel kesempatan kerja disatu sisi sebagai variabel independen dari pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dan disisi lain sebagai variabel dependen dari pengeluaran pemerintah dan investasi. Begitu juga variabel pertumbuhan ekonomi, disatu sisi sebagai variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan disisi lain dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, investasi dan kesempatan kerja. Dalam penelitian ini hubungan antar variabel berdasarkan substansi teori dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- Pengaruh Investasi dan Kesempatan kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali
- c) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Kesempatan kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali

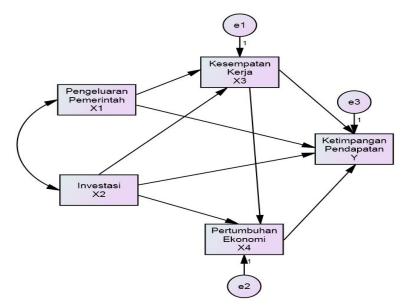
Hubungan antar variabel penelitian ini ditampilkan pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1 dapat dibuat persamaan struktural, yaitu:

$$X_3 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_1 \dots$$
 (1)

$$X_4 = \beta_3 X_2 + \beta_4 X_3 + \epsilon_2$$
 (2)

$$Y = \beta_5 X_1 + \beta_6 X_2 + \beta_7 X_3 + \beta_8 X_4 + \varepsilon_3$$
 (3)

Diagram alur model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian berbasis teori dan konsep, yang dapat diilustrasikan seperti Gambar 1



Gambar 1 Hubungan Antarvariabel Penelitian

Dalam menggunakan analisa jalur dengan program *AMOS*, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam mengevaluasi data yaitu :

1. Evaluasi normalitas

Evaluasi Normalitas Data dengan Normalitas Univariate dan Multivariate, yaitu menganalisis tingkat normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Univariate melihat nilai CR pada Skewness diharapkan disekitar \pm 2.58. Bila ada nilai diluar angka tersebut bisa ditoleransi apabila nilai Multivariatenya masih disekitar \pm 2.58.

2. Evaluasi Goodness Of Fit

Berikut ini beberapa indeks kesesuaian dan *cut-off value* untuk menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak (Ferdinand, A., 2002):

a) Square Multiple Correlations (R²), yaitu kemampuan model untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

- b) ^{X2}-Chi-square statistik, yaitu model dipandang baik bila nilai chi-square nya rendah. Semakin kecil nilai ^{X2} semakin baik model itu dan diterima berdasarkan probabilitas dengan *cut-off value* sebesar > 0.05
- c) RMSEA (*The Root Mean Square Error of Approximation*), merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengkonpensasi *chi-square* dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah *close fit* dari model itu berdasarkan *degrees of freedom*.
- d) GFI (*Goodness of fit Index*) adalah menghitung proporsi tertimbang dari varian dalam matriks kovarian sampel yang dijelaskan oleh matrik kovarian populasi yang diestimasikan. Ukuran *non statistical* mempunyai rentang nilai antara (*poor fit*) sampai dengan 1(*perfect fit*). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah "*better fit*".
- e) AGFI (*Adjusted Goodness of Fit Index*), merupakan kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari varian dalam sebuah matrik kovarian sampel. GFI adalah analog dari R² dalam regesi berganda yang mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90
- f) CMIN/DF (*The Minimum Sample Discrepancy Function Devided with degree of Freedom*), merupakan statistic chisquare X² dibagi degree of freedom-nya sehingga disebut X²relatif. Bila nilai X2 relatif kurang dari 2.0 atau 3.0 adalah indikasi dari *acceptable fit* antara model dan data.

- g) CFI (*Comparative Fit Index*), rentang nilai sebesar 0 -1, dimana semakin mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi. Nilai yang direkomendasikan adalah CFI sebesar 0,95.
- Pengaruh Langsung adalah pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefesien jalur dari satu variabel ke variabel lainnya.
- 4. Pengaruh Tidak Langsung adalah pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya melalui satu atau lebih variabel mediasi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel mediasi adalah variabel kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
- Pengaruh Total adalah total koefisien dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Normalitas

Hasil pengujian normalitas data dengan Normalitas Univariate dan Multivariate dalam penelitian ini dapat disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Assessment of normality

Variable	min	max	Skew	c.r.	kurtosis	c.r.
X1	4.140	12.740	1.038	3.815	1.056	1.941
X2	3.990	51.310	1.526	5.607	3.228	5.930
X3	96.430	98.950	.230	.845	-1.103	-2.027
X4	4.020	7.300	.007	.025	476	874
Y	.174	.425	.692	2.543	.229	.420
Multivariate					3.951	2.125

Sumber: hasil analisis, diolah.

Berdasarkan Tabel 1, nilai CR pada Skewness untuk variabel X3, X4 dan Y mempunyai nilai < 2,58 yaitu sebesar 0,845, 0,025 dan 2,543, sehingga data yang akan digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Nilai CR pada Kurtosis, hanya variabel X2 yang tidak berdistribusi normal karena nilai CR > 2,58 yaitu sebesar 5,930. Nilai CR> 2,58 bisa ditoleransi karena nilai multivariatenya berada disekitar 2,58, yaitu sebesar 2,125, sehingga data yang akan digunakan dalam penelitian ini secara multivariate berdistribusi normal.

Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit

Menilai Goodness of Fit Indeks dari Square Multiple Correlations (R2)

Evaluasi terhadap goodness of fityang dilakukan dengan melihat besarnya R^2 dapat disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Square Multiple Correlations

Square within Correlations							
Variabel	R Square						
Kesempatan Kerja (X ₃)	0.398						
Pertumbuhan Ekonomi (X4)	0.283						
Ketimpangan Pendapatan (Y)	0.492						

Sumber: hasil analisis, diolah.

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa nilai R square sebesar 0.398 untuk Kesempatan Kerja (X₃), berarti model regresi memiliki goodness-fit yang baik dimana variable kesempatan kerja dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah dan investasi sebesar 39,80 % dan 60,20 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini. Nilai R square Pertumbuhan Ekonomi (X₄) sebesar 0,283 yang berarti model regresi memiliki goodness-fit

yang baik dimana variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah, investasi dan kesempatan kerja sebesar 28,30 % dan 61,70 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini.

Nilai R square Ketimpangan Pendapatan (Y) sebesar 0,479 yang berarti model regresi memiliki goodness-fit yang baik dimana variabel Ketimpangan Pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebesar 49,20 % dan 50,80 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini.

Menilai Goodness of Fit Indeks dari Hasil Uji Full Model

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria *goodness of fit*. Berikut ini hasil analisa *goodness of fit* indeks dari hasil uji full model disajikan pada Tabel 3

Tabel 3
Goodness of Fit Index

Goodness of Fit Measure Nilai Kritis	(Cut of Value)	Hasil Analisis	Evaluasi Model
Chi Square (λ2)	Diharapkan kecil≤ 3,841	4,425.	marginal
Significance Probability (p)	\geq 0,05	0.035	marginal
RMSEA	\leq 0,08	0,207	Kurang baik
GFI	≥0,90	0.979	baik
AGFI	\geq 0,90	0,684	marginal

ISSN: 2337-3067

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7 (2016): 2123-2160

CMIN/DF	≤ 2,00	1	baik
CFI	\geq 0,94	0,972	baik

Sumber: hasil analisis, diolah.

Hasil selengkapnya pengujian kriteria layak tidaknya model (*goodness of fit index*) tahap akhir dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan parameter nilai *goodness of fit index*, hanya nilai RMSEA yang kurang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa model analisa secara keseluruhan sudah fit dan ada kesesuaian antara model dan data.

Pengaruh Langsung

Perhitungan koefisien jalur dalam penelitian ini menggunakan multiple regresi untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran pemerintah, investasi, dan kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, maka program yang digunakan adalah program *Analysis Moment of Structural* (AMOS) terhadap model persamaan struktural seperti yang disajikan pada teknik analisis. Koefisien jalur terhadap model teoritis dapat disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

Koefisien Jalur Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Kesempatan Kerja,
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kota di
Provinsi Bali Tahun 2005-2013

Regresi	Koefisien Regresi Standar	C.R	P Value	Keterangan	
X3 < X1	0.187	2.040	.041	Signifikan	
X3 < X2	0.544	5.931	***	Signifikan	
X4 < X2	0.399	3.351	***	Signifikan	
X4 < X3	0.186	1.560	.119	Tidak Signifikan	

Sri Danawati, I.K.G. Bendesa dan Made Suyana Utama. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah...

Y	<	X1	0.231	2.601	.009	Signifikan
Y	<	X2	0.043	.392	.695	Tidak Signifikan
Y	<	X3	0.360	3.423	***	Signifikan
Y	<	X4	0.298	3.079	.002	Signifikan

^{***} sig alpha (< 0,001)

Sumber: hasil analisis, diolah.

Berdasarkan Tabel 4 dan ditampilkan kembali pada gambar 1 dapat dibuat persamaan struktrural sebagai berikut :

a) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Model persamaan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

$$X_3 = 0.187 X_1 + 0.544 X_2 \tag{1}$$

Keterangan:

 X_1 = Pengeluaran Pemerintah

 $X_2 = Investasi$

 $X_3 = Kesempatan Kerja$

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah ternyata berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2005 – 2013. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 0,187 dan signifikan pada 5%, begitu juga variabel investasi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2005–2013 dengan koefisien parameter sebesar 0,544.

b) Pengaruh Investasi dan Kesempatan kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Model persamaan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

$$X_4 = 0.399X_2 + 0.186 X_3$$
 (2)

Keterangan:

 $X_2 = Investasi$

 $X_3 = Kesempatan Kerja$

 X_4 = Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel investasi dan kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap petumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2005–2013. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien parameter masing-masing 0,399 dan 0,186 dengan signifikan pada 5%.

c) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Kesempatan kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.Model persamaan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y = 0.231 X_1 + 0.043 X_2 + 0.360 X_3 + 0.298 X_4 \dots$$
 (3)

Keterangan:

 X_1 = Pengeluaran Pemerintah

 $X_2 = Investasi$

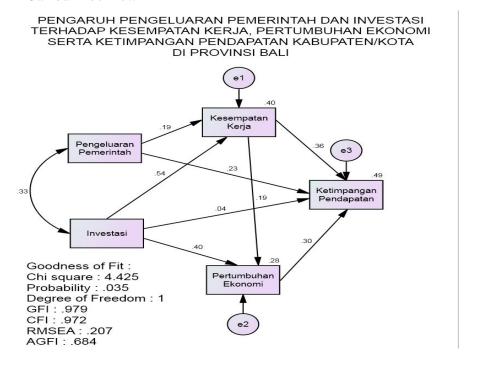
 $X_3 = Kesempatan Kerja$

 X_4 = Pertumbuhan Ekonomi

Y = Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi ternyata berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2005–2013. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 0,231, 0,043, 0,360 dan 0,298 dengan signifikan pada 5%. Jadi kemungkinan terdapat distribusi pendapatan yang belum merata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama tahun 2005 -2013.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dibuat diagram jalur yang disajikan dalam Gambar 1 berikut:



Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effects)

Dengan menggunakan program *AMOS*, hasil pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dapat sajikan pada Tabel 3 berikut

ISSN: 2337-3067

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7 (2016): 2123-2160

Indirect effects Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Bali Tahun 2005-2013

Pengaruh antar variabel	Mediasi	Koefisien Regresi Terstandar
$X_1 \rightarrow X_4$	X_3	0,035
$X_1 \rightarrow Y$	X ₃ , X ₄	0,078
$X_2 \rightarrow X_4$	X_3	0,101
$X_2 \rightarrow Y$	X_{3}, X_{4}	0,345
$X_3 \rightarrow Y$	X_4	0,056

Keterangan:

 X_1 = Pengeluaran Pemerintah

 $X_2 = Investasi$

 $X_3 = Kesempatan Kerja$

 X_4 = Pertumbuhan Ekonomi

Y = Ketimpangan Pendapatan

Pengaruh Total (Total Effect)

Analisis jalur juga menunjukkan besaran dari pengaruh total, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Hasil olahan data mengenai perhitungan pengaruh langsung, tidak langsung, dan total variabel penelitian ditampilkan pada Tabel 6

Tabel 6
Ringkasan Direct Effects, Indirect Effects, dan Total Effects

		X_1			X_2			X_3			X_4	
	DE	IE	TE									
X_3	0,187	-	0,187	0,544	-	0,544	-	-	-	-	-	-
X_4	0.000	0,035	0,035	0,399	0,101	0,500	0,186	-	0,186	-	-	-
Y	0,231	0,078	0,309	0,043	0,345	0,388	0,360	0,056	0,416	0,298	-	0,298

Keterangan:

X₁ adalah Pengeluaran pemerintah

X₂ adalah Investasi

X₃ adalah Kesempatan kerja

X₄adalah Pertumbuhan ekonomi

Y adalah Ketimpangan distribusi pendapatan

*IE*adalah pengaruh tidak langsung

DEadalah pengaruh langsung

TEadalah pengaruh total

Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2013, pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa naiknya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali akan meningkatkan kesempatan kerja. Pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan dapat menjadi pendorong dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi Sutriyono (2011) tentang pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja. Menurutnya, dari sisi pengeluaran pemerintah yang berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan mendorong penerimaan masyarakat, melalui efek pelipatgandaan (*multiplier effect*), dimana peningkatan pendapatan tersebut mendorong konsumsi dan tabungan masyarakat, serta peningkatan permintaan secara keseluruhan, sehingga memberi rangsangan bagi produsen untuk menambah investasi/memperluas kapasitas produksi akibatnya akan tercipta kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Jadi pengeluaran pemerintah merupakan suatu cara untuk menggerakkan permintaan yang dapat memompa suatu perekonomian yang sedang tertekan dan memulihkan tingkat kesempatan yang tinggi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002). Todaro (2000) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa "pembayaran transfer" dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka ketimpangan distribusi pendapatan juga semakin tinggi. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pengeluaran yang tergolong belanja publik yang semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya terjangkau atau dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yoga (2006), dimana dalam kurun waktu 1993-2004, secara serempak variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan investasi secara serempak berpengaruh nyata terhadap tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara parsial variabel pertumbuhan investasi meningkatkan tingkat kesenjangan

pembangunan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan adanya pengaruh tersebut.

Pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2009) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan salah satunya dilihat dari sejauh apa pemerintah tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Karena adanya investasi maka dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah. Sebagai akibat yang akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut dan akan menambah output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2009) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan salah satunya dilihat dari sejauh apa pemerintah tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi akan

berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional.

Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Besaran investasi yang masuk ke kabupaten/kota di Provinsi Bali akan memberi dorongan kuat pada capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Selama tahun 2000-2013 secara rata-rata Investasi kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Namun Kabupaten Badung merupakan wilayah yang secara persentase mempunyai kenaikan paling kuat di Provinsi Bali. Ini disebabkan karena Badung merupakan daerah pariwisata dan para investor lebih banyak menanamkan modalnya di bidang pariwisata dibandingkan dengan di sektor pertanian. Soekarni dkk (2010) berpendapat kenaikan ini merupakan pemeberlakuan paket kebijakan perbaikan iklim investasi melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2006 serta pemberlakuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2013, investasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ini menunjukkan naiknya investasi kabupaten/kota di Provinsi Bali akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh Nata Wirawan (2005) yang menyatakan bahwa pertumbuhan investasi berpengaruh nyata dan positif terhadap PDRB Bali. Hal yang sama diungkapkan oleh Manuaba, B.P. (2006) yang menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan

investasi berpengaruh positif dan nyata terhadap PDRB Kabupaten Badung. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahnaz Rabiei & Mazoidi (2012) yang meneliti investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di delapan negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Mesir, Iran, Malaysia, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Indonesia dan Turki. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa investasi asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tiap negara. Peran investasi asing tercermin dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, transfer teknologi, dan daya saing usaha yang meningkat.

Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi dibutuhkan sebagai faktor penunjang didalam peningkatan proses produksi. Investasi memiliki peran aktif dalam menentukan tingkat output, dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju investasi (Arsyad, 1999).Sesuai dengan teori, investasi akan memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sebagai konsekwensi naiknya pendapatan yang diterima masyarakat (Sun'an & Astuti, 2008). Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka pendapatan cenderung membaik, sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Hasil analisis tahun 2005-2013 menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ini berarti bahwa investasi meningkat maka ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat. Di daerah yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi. Di daerah lainnya dimana perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah.Dengan perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi

ISSN: 2337-3067

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7 (2016): 2123-2160

didaerah yang mapan mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau bertambahnya ketidakmerataan.

Seperti halnya dikabupaten/kota di Provinsi Bali perkembangan investasi sangat dominan di Bali selatan yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.Besarnya investasi di kedua daerah ini tidak lepas dari pengaruh sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian didaerah tersebut. Keengganan investor berinvestasi di sektor lain seperti pertanian membuat kabupaten lain sulit menyaingi kedua daerah ini dalam menarik investasi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga (2006) yang menyatakan bahwa pertumbuhan investasi meningkatkan tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali dan pertumbuhan investasi mempunyai pengaruh nyata atau pengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan.

Pengaruh Kesempatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Esmara (1990), pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja berkolerasi positif, tetapi besar kecilnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kesempatan kerja ditentukan oleh faktor teknologi, dan kualitas tenaga kerja yang digunakan.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Swasono (1983) yang menyatakan bahwa meskipun perluasan kesempatan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi semata, namun faktor pertumbuhan ekonomi cukup signifikan dan harus diperhatikan agar tercapai sasaran perluasan kesempatan kerja.Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan dapat diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.

Sadono (1994:15) mengatakan bahwa salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran sesuatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya.Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Sebagaimana penjelasan diatas, maka dengan meningkatnya angka pengangguran yang terdapat di suatu daerah akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi konsumsinya, yang mana pada akhirnya berakibat pada rendahnya pendapatan yang akan diterima oleh suatu daerah.

Pengaruh Kesempatan Kerja terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Menurut Todaro (2000:89) bahwa dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari 2 ukuran pokok yaitu distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Kemudian menurut Ahluwalia (1997) yang menggambarkan penerimaan pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah dan 20 persen menerima pendapatan yang paling tinggi.

Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi, Suryono (2000:5) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka penjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, kostruksi, perdagangan dan keuangan memang memberikan

pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan yang didominasi oleh sektor primer, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Estudilo Jonna P (1997), yang melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Filipina, dimana dari hasil penelitian menemukan ada pengaruh antara populasi/penduduk dengan distribusi pendapatan dan selain itu pendapatan dari upah yang memiliki kontribusi dalam mempengaruhi distribusi pendapatan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Lyndon, Pangemanan (2001) yang melakukan studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Dimana dari hasil penelitian yang menemukan kenaikan proporsi penduduk secara signifikan akan menurunkan distribusi pendapatan, kemudian proporsi anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga. Sedangkan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan distribusi pendapatan rumah tangga, walaupun pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu **syarat** tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan tersebut. Apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika sebagian kecil orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak memperkecil mampu mereduksi kemiskinan dan ketimpangan. Sebaliknya jika sebagian besar yang turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil, Todaro (2006).

Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan.Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi ketimpangan pendapatan.Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Kuznet dalam Soekirno, (1995) yang mengatakan bahwa proses pembangunan ekonomi suatu negara pada tahap awal umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, dan baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih baik pada tahap pembangunan lebih lanjut. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat, selanjutnya akan menurun yang dikenal dengan hipotesis U terbalik. Teori inisejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarteja (2003) yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat disparitas hasil pembangunan.Tetapi penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Noegroho dan Soelistianingsih (2008) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap disparitas pendapatan.

Konsep yang disampaikan Todaro & Smith, (2006) bahwa karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) sebagai penentu apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap masyarakat miskin atau tidak.Karakter tersebut terbangun melalui bagaimana cara pencapainnya. Karakter pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah pertumbuhan berbasisi sektor modal, dengan sektor pariwisata sebagai sektor prioritasnya.Ini berarti bahwa sektor pariwisata akan mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi tidak diikuti oleh penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja.Hal ini berarti semakin tinggi pengeluaran pemerintah semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja.Hal

ini berarti bahwa besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja ternyata cukup kuat untuk memberi efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja adalah signifikan, maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja memediasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian darikebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannyaperekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional danAPBD untuk daerah/regional (Sadono Sukirno,2000). Tujuan dari kebijakan fiscal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatankerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif kecil dibanding komponen lain dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi. Walau demikian, pengeluaran pemerintah mempunyai efek sosial politis yang strategis sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Selain itu, pengeluaran pemerintah pun mempunyai efek multiplier terhadap ekonomi makro riil dalam pergerakan jangka pendek dari output dan ketenagakerjaan (Samuelson & Nordhaus, 2001).

Jamzoni Sodik melakukan penelitian pada tahun 2007, variabel pengeluaran pemerintah daerah yang terdiri daripengeluaran pembangunan dan pengeluran rutin berpengaruh dansignifikan dengan tanda positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Untuk variabel yang lain, yaitu ekspor neto dan angkatan kerja signifikandengan tanda yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardijono (2013) yang menyatakan pengaruh kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tidak signifikan.Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Bali yang didominasi pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi cenderung padat modal, sehingga pemerintah perlu mengarahkan investasi swasta ke sektor-sektor padat karya.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan melalui Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Adelmen dan Morris dalam Yoga (2006) mengatakan penyebab dari ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah pertambahan penduduk yang tinggi, inflasi, ketidakmerataan pembangunan daerah, *capital intensive*, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri, memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang sedang berkembang dengan negara maju dan hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga.

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positifdan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.Dimana semakin besar pengeluaranpemerintah maka kesenjangan pendapatan juga semakin tinggi.Hal ini berartipengeluaran pemerintah belum mampu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatanmasyarakat.Pengeluaran yang tergolong belanja semestinya dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan kesenjanganpendapatan dalam penelitian ini mengalami peningkatan.Ini disebabkan karenapengeluaran pemerintah belum sepenuhnya terjangkau atau dapat dinikmati olehmasyarakat secara langsung.

Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpanganekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorongdan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan regional (Majidi, 1997). Delis (2008) pertumbuhan tidak selalu terjadi secara merata pada semua wilayah. Pada tahap awal, proses pembangunan cenderung terkosentrasi dan terpolarisasi pada area pusat suatu wilayah.

Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerjadan pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja dan pertumbuhan

ekonomi tidak memediasi secara parsial pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan (Hair et al, 2010).

Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kesempatan KerjaKabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal.Semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi.Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut (Harrod Domar dalam Jawas, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh tidak langsung investasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja adalah signifikan, maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja memediasi secara parsial pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Investasi memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses penciptaan *output* jangka panjang. Ini sejalan dengan hasil penelitian Were dalam Haryadi (2009), bahwa investasi tidak memberi dampak secara langsung pada tahun bersangkutan, namun baru dapat dirasakan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi setelah beberapa tahun kemudian.

Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan melalui Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi (Sajafii, 2009). Daerah yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi. Di daerah lainnya dimana perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin

rendah. Dengan perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi didaerah yang mapan mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau bertambahnya ketidakmerataan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh tidak langsung investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui kesempatan kerjadan pertumbuhan ekonomi adalah signifikan, maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja memediasi pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darma Rika Swaramarinda dan Susi Indriani (2011) yang meneliti peranan variabel pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran investasi pemerintah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini karena pengeluaran investasi pemerintah memilki peran ekonomi dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat dan anggaran pembangunan dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dibiayai sendiri oleh masyarakat.

Pengaruh Kesempatan Kerja terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Sehubungan dengan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mempercepat proses konvergensi PDRB per kapita di Provinsi Bali, yaitu dengan pola pertumbuhan yang tidak seimbang pada besarnya kesempatan kerja untuk meningkatkan PDRB per kapita. Dibukanya lapangan kerja yang padat karya dengan mempertimbangkan pemerataan fisik dan prasarana pendidikan di setiap kabupaten/kota juga merupakan upaya yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan dalam fasilitas pendidikan akan dapat membantu mempercepat proses konvergensi antar daerah.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada

pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi untuk memenuhi pasar domestik yang meningkat. Namun disisi lain, Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhan ekonominya masihrendah. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh tidak langsung kesempatan kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi adalah positif maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomimemediasi pengaruh kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya mediasi pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk pengurangan ketimpangan pendapatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Hal ini berarti bahwa besarnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat meningkatkan kesempatan kerja.
- 2) Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka ketimpangan distribusi pendapatan juga semakin tinggi. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.
- 3) Investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara investasi dengan kesempatan kerja

- kabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga kenaikan investasiakan meningkatkan kesempatan kerja.
- 4) Investasi secara langsung menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ini menunjukkan naiknya investasi kabupaten/kota di Provinsi Bali akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 5) Investasi secara langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan pendapatan. Ini berarti bahwa investasi meningkat maka ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat.
- 6) Kesempatan kerja secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan karena peningkatan kesempatan kerja dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- 7) Kesempatan kerja secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak hanya ketergantungan pada dunia kerja kantoran, justru sebagian besar merupakan pegawai kontrak.
- 8) Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadapketimpangan pendapatan. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi ketimpangan pendapatan.
- 9) Pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melelui kesempatan kerja. Hal ini berarti bahwa besarnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat meningkatkan pertumbuhan melalui kesempatan kerja. Besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja ternyata cukup kuat untuk memberi efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.Hal ini disebabkan karena melalui mediasi kesempatan kerja mampu meningkatkan petumbuhan ekonomi.
- 10) Pengeluaran pemerintah secara tidak langsung mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan

ekonomi dan pengaruh positif membawa penurunan ketimpangan pendapatan yang artinya pendapatan dapat lebih merata. Hal ini berarti kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memediasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan.

- 11) Investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi masih lebih rendah daripada sebelum mediasi, maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja belum diperlukan untuk memediasi pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 12) Investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Setelah melalui mediasi kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan semakin tinggi dan timpang. Hal ini berarti kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi belum diperlukan memediasipengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan.
- 13) Kesempatan kerja secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, namun pengaruh positif membawa penurunan ketimpangan pendapatan yang artinya pendapatan dapat lebih merata. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memediasi pengaruh kesempatan kerja terhadap ketimpangan pendapatan.

Saran

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali dan melalui kesempatan kerja ketimpangan masyarakat menurun yang artinya distribusi pendapatan lebih merata. Oleh karena itu, pemerintah harus menyikapinya dengan serius dan hati-hati khususnya dalam penetapan strategi pengalokasian dan pendistribusian pengeluaran pemerintah agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali lebih berdampak pada perluasan kesempatan kerja di Provinsi Bali. Alokasi investasi hendaknya diarahkan

pada kabupaten/kota yang memilki investasi fisik yang rendah, sehingga alokasi investasi tidak terpusat pada daerah tertentu dan alokasi investasi juga diharapkan merata di semua sektor. Alokasi investasi juga harus dilihat berdasarkan potensi daerah yang belum diupayakan, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang baru terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Investasi yang masuk ke Provinsi Bali harus diarahkan ke sektor-sektor padat karya dan didistribusikan merata di wilayah Provinsi Bali. Pemerintah harus memiliki gambaran wilayah maupun sektor/lapangan usaha alokasiagar dapat dijadikan pedoman yang akurat dalam penetapan kebijakan investasi di Provinsi Bali. Di samping itu, pemerintah pun harus memiliki komitmen untuk menerapkan kebijakan investasi yang berpihak pada masyarakat Provinsi Bali. Dengan demikian, investasi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan mayarakat Provinsi Bali secara menyeluruh melalui perluasan kesempatan kerja peningkatan pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Aaberge, Rolf & Audun Langorgen. 1997. Fiscal and Spending Behavior of LocalGovernment: An empirical analysis based on Norwegian data. *Statistics Norway, Discussion paper no. 196*.
- Adhisasmita. 2005. Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional: Indonesia 1992-2004. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol. 9, No. 2, Hal: 129-142.
- Alisjahbana, Armida S., 2000, *The Implication of Fiscal Decentralisation on Local Government Own Revenue Mobilization, Economic Journal*, Vol. XV, No. 2, September 2000,7-26.
- Badan Pusat Statistik. 2014. PDRB Provinsi Bali Tahun 2009-2013.
- ______. 2010. "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2005-2009". Badan Perencanaan Pemerintah daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Barro, Roberi. J.1999. *Inequality, Growth, and Investment. NBER Working Paper Series* (Working paper 7038)
- Boediono. 1981. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dakurah, A. H. Davies, S. P. and Sampath, R. K. (2001), Defense Spending and Economic Growth in Developing Countries A Causality Analaysis, Journal of Policy Modelling, 23 pp 651-658.
- Dalamagas, B. (2000), Public Sector and Economic Growth: the Greek Experience: *Applied Economics*, 32(3), pp 277-288.

ISSN: 2337-3067

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7 (2016): 2123-2160

- De Fretes, Pieter N.2007. Analisis tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol. 5 (1), 8-17
- Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. Wisconsin local government, State share revenue and the illusive flypaper effect. University of Wisconsin-Madison, working paper.
- Elyani. 2010. Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Berinvestasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Vol 3 (1), 42-50
- Ferdinand, A, 2002. Structural Equation Modelling Dalam Peneltian, Edisi 2.Semarang: Seri Pustaka Kunci 03/BP UNDIP
- Gamkhar, Shama & Wallace Oates. 1996. Asymetries in response to increase And decrease in intergovernmental grants: Some empirical findings. *National Tax Journal* 49 (4):501-512.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan AMOS 21.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim,2001. Bunga Rampai : *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Lewis. 1954. *Microeconomic Theory A Mathematical Approach* Third Edition Singapore, Mc Graw-Hill International Book Co.
- Jawas, Musleh.2008. "Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Muslim Tahun 2004 2005" (Skripsi). Yokyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Jhingan, ML.1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi keenambelas, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Joseph F.Hair.Jr. William C, Black Barry J, Babin Rolph E. Anderson, Pearson. 2010. *Multivariate Data Analysis. Seventh edition*.
- Kembar, Sri-Budhi, M. 2010. Memaknai Bias-Bias Kinerja Indikator Pembangunan Kaitannya Dengan Kesejahteraan. *Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Kunarjo. 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Edisi Kedua. Universitas Indonesia.
- Lubis, Pardamean. Afifudin, Sya'ad & Mahalli, Kasyful.2008. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia*. Vol.3 (2), 111-126
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta.
- Marhaeni, A.A.I.N. dan Manuati Dewi, I.G.A. 2004. Buku AjarEkonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Manuaba, B.P. 2006. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan investasi, dan Ekspor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung. Tesis S2 MEP UNUD Denpasar (tidak dipublikasikan).

- Nata Wirawan,2005. Analisis Pengaruh Pertumbuhan investasi dan Ekspor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali (1989-2003). Tesis MEP UNUD Denpasar (tidak dipublikasikan).
- Nugroho, Iwan & Rochim Danuri, 2004, Pembangunan Wilayah Persepektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.
- Simon Kuznets, 1955. Economic Growth and Income Inequality, The American Economic Review, Volume XLV.
- Sinung Noegroho, Yoenanto dan Lana Soelistianingsih, 2007. "Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional "Pararel Session IV A: Urban & Regional. UI Depok.
- Soekarni, M. Hidayat, AS. Suryanto, J.2010. Peta Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia, Vol 18 No 1. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: Pusat Peneliti Ekonomi.
- Sodik, J. 2007. Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel Di Indonesia. Vol. 12 Nomor 1. Economic Journal of Emerging Markets.
- Sukirno, Sadono, 1995. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan LPFE UI, Jakarta.Syafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, LP3ES, Jakarta.
- ______, S. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Susanti. 1995. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Propinsi Jawa Tengah" (*tesis*). Yogyakarta: UGM.
- Suyana Utama, Made. 2008. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Buku Ajar, Sastra Utama, Denpasar.
- ______, 2011. *Metode Kunatitatif*. Modul pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Yoga, I Made Sedana. 2006. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesenjangan Pembangunan antardaerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali" (*tesis*). Denpasar: Universitas Udayana.